

## LUMPUR LAPINDO

### Korban Butuh Perantara yang Andal

MALANG, KOMPAS - Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur, di 45 rukun tetangga, meminta Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menjadi mediator dengan pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah semburan lumpur di daerah itu. Din dinilai andal dan punya akses untuk menyampaikan permasalahan itu kepada pemerintah.

Selama ini upaya warga secara langsung kepada pemerintah belum membuahkan hasil.

Permintaan warga ini disampaikan tujuh orang perwakilan ribuan korban lumpur seusai Din membuka Kajian Ramadhan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (13/8).

Pertemuan itu awalnya dijadwalkan sebelum Din membuka acara itu. Namun, korban lumpur terlambat tiba karena terkena kemacetan lalu lintas. "Karena Pak Din harus segera ke bandara, pertemuan berlangsung sangat singkat," kata Jasimin, koordinator 45 RT di beberapa desa di dua kecamatan, yaitu Porong dan Tanggulangin.

Kepada Din, korban lumpur menyampaikan, pemerintah berlaku tidak adil karena hanya memberikan ganti rugi kepada 9 RT. Padahal, kondisi 45 RT setaraf dengan 9 RT itu. Bahkan, ada 4 RT yang jauh lebih parah.

"Kami berharap Pak Din bisa menjadi mediator bagi kami untuk berbicara dengan pemerintah. Kalau Presiden menghendaki penyelesaian menyeluruh dan permanen, tidak pantas menafikan 45 RT ini," tutur Jasimin.

Warga juga sempat menyinggung kondisi sosial ekonomi korban lumpur yang kini sangat berat. Lahan sudah tidak bisa ditanami. Sebagian rumah hampir roboh. Akibat semburan gas, sebagian rumah tidak bisa dihuni lagi. Keputusan pemerintah memberikan ganti rugi hanya kepada 9 RT berpotensi memicu konflik sosial.

"Karena terbatasnya waktu, Pak Din meminta kami datang ke Jakarta hari Senin ini," katanya.

Warga juga menyerahkan segepok dokumen terkait dengan masalah korban lumpur kepada Din, antara lain surat Gubernur Jatim Soekarwo tertanggal 30 Mei 2011 yang meminta perlunya percepatan penanganan bagi korban lumpur di 45 RT. (ANO)